



LEMBARAN KALURAHAN MONGGOL
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 4

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN MONGGOL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MONGGOL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Monggol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Tahun Anggaran 2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Desa Monggol Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Monggol (Lembaran Desa Monggol Tahun 2014 Nomor 2);
 22. Peraturan Desa Monggol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Monggol Tahun 2019 Nomor 3);
 23. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2019 Nomor 2);
 24. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Monggol

- Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MONGGOL

dan
LURAH MONGGOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.662.554.100,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.903.224.682,68</u>
Surplus/Defisit	(Rp 240.670.582,68)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 240.670.582,68
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 240.670.582,68+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);

- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Monggol.

Ditetapkan di Monggol
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,



Diundangkan di Monggol
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

BAYU DWIATMAKA WARDHANI

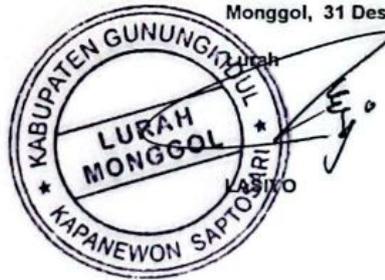
LEMBARAN KALURAHAN MONGGOL TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MONGGOL
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.635.654.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.150.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.662.554.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	677.369.022,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.118.256.778,12	
5.3.	Belanja Modal	908.083.882,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	199.515.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.903.224.682,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(240.670.582,68)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	240.670.582,68	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	240.670.582,68	
	PEMBIAYAAN NETTC	240.670.582,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Monggol, 31 Desember 2024



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MONGGOL
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MONGGOL
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.635.654.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.662.554.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.130.730.819,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	870.769.186,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	533.105.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	533.105.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.415.642,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.415.642,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	99.854.283,44	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.854.283,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.445.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.445.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.490.880,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.490.880,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.610.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.610.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	92.184.932,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	54.984.932,00	ADD PAD, PB-I
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	54.984.932,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	27.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	ADD
1.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.216.605,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	28.500.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.305.629,00	DLL
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.305.629,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	14.410.977,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.410.977,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.860.095,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.009.045,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.009.045,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	4.350.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.750.000,00	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.515.000,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.515.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.500.000,00	PBH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.877.000,00	DDS, PBP
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.877.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.934.050,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	13.734.050,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.500.000,00	DDS
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	26.875.000,00	ADD
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.875.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.400.000,00	DLL
1.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	11.750.000,00	PBP
1.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.700.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	6.550.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	6.150.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.419.679.978,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	9.100.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	306.190.078,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.460.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.460.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	8.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.625.078,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.078,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	20.400.000,00	DDS, PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	17.750.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	21.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	30.240.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	118.540.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.540.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	32.425.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.425.000,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	773.214.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	222.742.150,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	222.742.150,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	260.634.750,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	260.634.750,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	289.838.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	289.838.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	311.175.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	PBP
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	260.000.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.175.000,00	DDS, PBP
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>111.748.885,68</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.050.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	7.050.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.563.885,68	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	50.163.885,68	DDS, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.163.885,68	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	8.950.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.450.000,00	DDS, PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.540.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.540.000,00	DDS
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.595.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.770.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.770.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.910.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.915.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.915.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>41.550.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.900.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.900.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.075.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.625.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.450.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.775.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.475.000,00	PBM
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.550.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.750.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.200.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.200.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.600.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.600.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>199.515.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.315.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.315.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.315.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.200.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.200.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.903.224.682,68	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(240.670.582,68)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	240.670.582,68	
		PEMBIAYAAN NETTC	240.670.582,68	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Monggol, 31 Desember 2024





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN MONGGOL

ꦧꦶꦭꦶꦏꦭꦸꦫꦩꦺꦁꦒꦺꦴꦭꦩꦺꦁꦒꦺꦴꦭꦩꦺꦁꦒꦺꦴꦭ

Jl. Jalur Pantai Selatan (Pansela) Km. 14, Baros Lor, Monggol, Saptosari
Email : monggoldesa@gmail.com Laman : www.desamonggol.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

**RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MONGGOL KAPANEWON SAPTOSARI**

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Kalurahan Monggol tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) Tahun 2025, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Monggol

Telah diadakan Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan, dan Anggota Bamuskal sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam sidang ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Materi Yang dibahas dalam sidang ini adalah:

1. Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Jalali, S.Pd.I Ketua Bamuskal
Notulen : Bayu Dwiatmaka W. Carik
Narasumber : Lasiyo Lurah

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Monggol dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Monggol yaitu :

Menyepakati dan Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Monggol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Monggol, 31 Desember 2024

Ketua Bamuskal

JALALI, S.Pd.I

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MONGGOL

Hari : ..Selasa.....
 Tanggal : ..31 Desember 2024.....
 Tempat : ..Auka Kalurahan Monggol.....
 Acara : ..Rapat Bersama Persetujuan APBDal 2025

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	LATIGO	LURAH	DILATAN	1
2	Gurari	Bamuskal	Monggol	2
3	Bayu Priatmaka W.	Carik	Baale	3
4	Jalali	BPKal	Saweli	4
5	Sajo	Dukuh	Kydu	5
6	WINAROI	DUKUH	DILATAN	6
7	Ari Hji Syatunida	Jb.	Ngl.	7
8	Sumarwoto	Kata laksana	Dilatan	8
9	ICadar motha	B.P. kal	Baras br	9
10	MAR 101	DUKUH	BCKR	10
11	SIMAN	DUKUH	B. Kidul	11
12	Sunark	Langgiph	Baem	12
13	Kadisa	Dukuh	Monggol	13
14	Samsid	Dukuh	Dulukji	14
15	SURONO	Bx kal	NGELO	15
16	Heri P.	BPKal	MOJOSARI	16
17	Tukijem	Dukuh	MOJOSARI	17
18	Yuli Khasanah	BPKal	Baras Fidu	18
19	Heri Narwanata	Bamuskal	Bulungjo	19
20	Eutadnyank	Dukuh	Bacok	20
21	Tri Supri	BPKal	Sigur	21

22	Sufardi	Kami-tuwa	Sawah	22	<i>[Signature]</i>
23	Sularumir	Stag	P. Jora	23	<i>[Signature]</i>
24	Wandi Hgroho	Dukuh	Baras Lor	24	<i>[Signature]</i>
25	Murtinah	Stag	Sawah	25	<i>[Signature]</i>
26	Kartilal.	Ulu-ulu	Monggol.	26	<i>[Signature]</i>
27				27	
28				28	
29				29	
30				30	
31				31	
32				32	
33				33	
34				34	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MONGGOL

[Signature]
JAJALI, S.Pd.I



[Signature]
SIYOD

